

MENGANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PENGGUNAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Fitra Amar Rosuli¹, Wahyudin², Yabib Fikri Rambe³, Maryam Batubara⁴
fitramarosuli@gmail.com¹, wahyudinfebiuinsu@gmail.com², yabibrambe19@gmail.com³,
maryam.batubara@uinsu.ac⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Pertumbuhan penggunaan uang elektronik mengalami perkembangan yang pesat, terlihat dari volume, nilai transaksi, dan preferensi masyarakat yang makin meningkat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan uang elektronik terhadap efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa uang elektronik tidak menimbulkan dampak inflasioner, baik dalam jangka panjang dan pendek. Instrumen suku bunga cukup efektif dalam mengendalikan kecepatan perputaran uang elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dalam mengumpulkan data. Metode penelitian yang digunakan adalah skenario pelaksanaan penelitian. Metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif digunakan karena peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Pendekatan studi literatur digunakan karena peneliti memperoleh sumber data dari berbagai studi literatur seperti jurnal, buku, website. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan pendek tidak memberikan pengaruh terhadap kenaikan transaksi uang elektronik. Begitu pula kenaikan transaksi uang elektronik dalam jangka panjang belum mampu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi. Uang elektronik tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kredit dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang potensi kenaikan kredit diikuti oleh meningkatnya transaksi secara digital.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Uang Elektronik, Inflasi.

ABSTRACT

The growth in e-money usage is undergoing rapid developments, as evidenced by increasing volumes, transaction values, and public preferences. The study aims to analyse the impact of the development of electronic money on the effectiveness of monetary policy in Indonesia. The results of the study show that electronic money has no inflationary impact, both in the long and short term. Interest-rate instruments are quite effective in controlling the rate of circulation of electronic money. The method used is qualitative research. By using library research in collecting data. The method of research used is a scenario of research execution. Qualitative methods of research with descriptive techniques are used because the researcher is the main instrument in research. The literature study approach is used because researchers obtain data sources from various literary studies such as journals, books, websites. The increase in long-term and short-term economic growth has no effect on the rise in e-money transactions. Electronic money does not have a significant impact on credit in the short term, but in the long term the potential for credit rise is followed by an increase in digital transactions.

Keywords: Monetary Policy, Electronic Money, Inflation,

PENDAHULUAN

Penggunaan uang elektronik sedang marak di Indonesia. Mulai dari kalangan muda bahkan sampai kalangan tua pun tertarik untuk menggunakan uang elektronik ini. Di samping penggunaannya yang semakin meluas, adapula kemudahan yang didapat dari penggunaan uang elektronik ini, meskipun masih banyak orang yang belum tertarik dan kurang memahami penggunaan uang elektronik, masyarakat seolah dipaksa menggunakan uang secara cashless. Hal ini terbukti pada peraturan transaksi pada gerbang tol yang sekarang sudah tidak menggunakan uang cash. Selain transaksi yang mudah dan cepat, hal ini juga tentunya menghindari tingkat penyelewengan dana. Banyak beragam manfaat yang didapatkan dari transaksi yang dilakukan secara cashless, salah satu hal yang menarik masyarakat untuk menggunakan transaksi cashless ini adalah promosi. Banyak promo yang ditawarkan apabila menggunakan transaksi dengan uang elektronik. Tentunya hal ini berdampak pada volume transaksi yang terjadi dan tingkat konsumsi yang meningkat. Dengan adanya promo yang ditawarkan, masyarakat semakin memilih menggunakan uang elektronik ini dan bisa saja transaksi ini menyebabkan masyarakat semakin konsumtif. Tentu hal ini sangat bagus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana tingkat konsumsi yang tinggi memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan. Orang yang akan berbelanja akan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi sehingga akan meningkatkan kecepatan perputaran uang.

Selain penggunaan uang elektronik dan dompet digital, jumlah uang beredar dan kurs mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dimana uang yang beredar adalah alat pembayaran yang digunakan masyarakat dalam bertransaksi sebelum adanya uang elektronik ini. Biasanya, perkembangan dari jumlah uang beredar ini sejalan dengan perkembangan ekonomi. Dalam kondisi ini memperlihatkan bahwa ketika perekonomian bertumbuh dan berkembang maka jumlah uang beredar pun akan bertambah.

Namun dibalik kemudahan bagi sebagian besar masyarakat adapula dampak negatif dari penggunaan uang elektronik ini, misalnya, akibat tingginya minat masyarakat terhadap uang elektronik, dapat menjadi tren bagi para penjahat cyber untuk melakukan penipuan. Misalnya pencurian data, pencurian uang lewat saldo yang terdapat di dalamnya. Selain kejahatan, bagi perekonomian juga terdapat dampak negatif yakni menyebabkan inflasi, walaupun tidak secara langsung menyebabkan inflasi. Sebagai pengguna, harus bijak dalam menggunakan uang elektronik ini agar terhindar dari dampak negatif dan risiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Perkembangan transaksi dalam penggunaan uang elektronik mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa studi mengenai dampak uang elektronik terhadap efektivitas kebijakan moneter menunjukkan hasil yang berbeda. Berangkat dari penelitian Sukmonkongsamoe (2019) yang menyebutkan bahwa uang elektronik meningkatkan efektivitas kebijakan moneter yang disebabkan karena pertumbuhan uang elektronik didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan keberadaan transaksi elektronik tidak menimbulkan disrupsi pada instrumen pembayaran konvensional.

Terkait perilaku penggunaan uang elektronik, Popovska-Kamnar (2014) dan Massaka (2019) dalam penelitiannya merekomendasikan untuk selalu menekankan pada pentingnya menjaga prinsip kehati-hatian dalam penggunaan uang elektronik. Namun, perspektif yang agak berbeda diungkap dalam penelitian Assenmacher & Krogstrup (2018) dimana menyebutkan perlunya pemisahan uang tunai dari uang elektronik dalam meminimalisir kelemahan yang ada pada transaksi uang tunai dan perlunya disusun kerangka kebijakan yang hingga saat ini masih menjadi pertanyaan. Jelas bahwa relasi dan eksistensi uang elektronik dengan peluang terjadinya dinamisasi penggunaan dan risiko

yang ditimbulkan menjadi subyek riil yang terjadi dalam perekonomian. Sebagai barang publik baru, uang elektronik menjadi ruang perdebatan tidak saja di ruas teoritis tetapi juga menghadirkan adanya implikasi kebijakan, khususnya di bidang moneter dan keuangan.

Pembayaran non-tunai semakin digandrungi di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan karena dinilai lebih efektif dan ekonomis sebagai alat transaksi pembayaran dan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi saat ini. Fenomena transaksi tanpa uang tunai (cashless) dan isi dompet yang lebih banyak kartu ketimbang uang, sudah makin jamak di tengah masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Selain penggunaan kartu debit dan kartu kredit di mesin ATM maupun EDC (Electronic Data Capture), aplikasi pembayaran dan dompet digital makin masif digunakan untuk pembayaran transportasi, membeli makanan, hingga membayar aneka tagihan bulanan. Masyarakat tidak perlu lagi membawa uang cash, melainkan hanya perlu membawa kartu debit maupun kartu kredit sehingga mengurangi resiko kejahatan, selain itu jika sedang malas untuk berpergian, masyarakat juga tinggal dapat mencari barang-barang yang diinginkan pada toko-toko online (e-commerce) dan kemudian tinggal melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM. Apalagi didukung dengan kemajuan teknologi semakin memudahkan orang-orang untuk melakukan transaksi tanpa keluar rumah melalui uang elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan studi pustaka dalam pengumpulan datanya. Metode penelitian adalah skenario pelaksanaan penelitian dijalankan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif dilakukan dalam penelitian ini karena peneliti menjadi instrument utama dalam penelitian, yang mana peneliti menjadi orang yang mengatur jalannya penelitian (Prof.Dr.Sugiyono, 2020). dengan mengkaji secara mendalam analisis data sekunder dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset. Sumber data dari jurnal ilmiah, buku teks, laporan riset.

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter terdiri dari dua kata, yaitu kebijakan dan moneter, kebijakan berasal dari bahasa Indonesia, yaitu bijak, imbuhan ke-ab pada kebijakan memiliki arti kepandaian, atau kemahiran. Menurut Wikipedia kebijakan adalah serangkaian konsep dan strategi asas yang dijadikan inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. (Dhuhayatun, 2023 : 66)

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang. Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.

Kebijakan moneter secara sinonim digunakan sebagai alat pengelolaan uang. Hal ini dapat digambarkan sebagai pengelolaan permintaan dan penawaran mata uang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dalam pengertian khusus, kebijakan moneter adalah Tindakan besar yang dilakukan pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Melalui cara tersebut pemerintah dapat mempengaruhi jumlah uang beredar, pengeluaran investasi, permintaan agregat dan berakhir pada tingkat harga sehingga kondisi ekonomi. Dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan moneter yaitu

untuk menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi tercapai. Instrumen kebijakan moneter syariah menggunakan profit loss sharing, margin, dan fee untuk menggantikan sistem suku bunga karena pelaku ekonomi syariah meyakini bahwa bunga sebagai komponen riba dalam transmisi kebijakan moneter akan tetap terjaga kestabilannya. (Dwihapsari, Kurniaputri, & Huda, 2021)

B. Perkembangan Sistem Keuangan

Financial system (sistem keuangan) suatu kaidah ataupun aturan yang menjelaskan sumber-sumber dana (keuangan) bagi negara dan proses alokasi dana tersebut bagi kehidupan masyarakat. Pada abad pertengahan (masa kehadiran islam), islam ini belum ditemukan di negara-negara Eropa, Namun di akhir abad pertengahan, beberapa negara bagian menuntut adanya sistem keuangan bagi negara hingga akhirnya rancangan dari sistem ini pun terbentuk.

Perkembangan sistem keuangan ini merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat seperti sebagai cara untuk menstabilisasi dalam perekonomian. Dalam hal menghimpun dana masyarakat yang diperlukan suatu kebijakan yang sangat vital dalam melihat perkembangan jumlah uang beredar. Perkembangan jumlah uang beredar ini, bukanlah sesuatu hal yang mutlak dalam menggerakkan suatu sendi perekonomian dikarenakan, perlu dilihat perkembangan sektor riil. Sektor riil sangat dominan menentukan pergerakan dari alokasi sistem keuangan sehingga satu sama lain saling mempengaruhi.

C. Definisi Uang Elektronik

Morvari (2015) mendefinisikan uang elektronik sebagai nilai yang disimpan dalam perangkat elektronik atau mekanisme pembayaran prabayar yang dapat digunakan oleh konsumen. Uang elektronik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berbasis server dan berbasis chip. Uang elektronik berbasis chip biasanya digunakan untuk transaksi dengan waktu singkat dan frekuensi tinggi seperti transportasi, sementara uang elektronik berbasis server umumnya digunakan untuk pembayaran online melalui web browser (Widyastuti et al., 2017). Bank Indonesia menekankan tiga unsur penting yang harus dipenuhi oleh uang elektronik, di antaranya:

- 1) diterbitkan dengan dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit,
- 2) nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti server atau chip, dan
- 3) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan perbankan.

Penggunaan uang elektronik yang semakin meningkat telah memicu studi tentang dampaknya pada kemampuan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang. Beberapa ekonom percaya uang elektronik dapat menggantikan uang tunai sepenuhnya, sementara yang lain melihat dampaknya lebih terbatas. Kemampuan bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang bergantung pada definisi uang, seperti M1, yang saat ini mencakup uang tunai, cek perjalanan, dan deposito berjangka. Jika penggunaan elemen-elemen ini menurun karena lebih banyak orang beralih ke uang elektronik, M1 tidak akan lagi menjadi ukuran yang akurat untuk uang dalam perekonomian. Ini akan membatasi kemampuan bank sentral untuk melakukan operasi pasar terbuka dan mengatur pasokan uang. Oleh karena itu, kebutuhan untuk operasi pasar terbuka akan berkurang karena pasokan uang akan menyesuaikan diri dengan permintaan secara otomatis (Palley, 2001). Dengan asumsi pasokan uang tetap, maka perubahan bertahap menuju penggunaan lebih banyak uang elektronik daripada uang tunai bisa membuat bank sentral memiliki lebih sedikit kontrol atas uang yang beredar. Ini terjadi karena uang tunai yang diatur oleh bank sentral berkurang, sementara uang elektronik yang diatur oleh bank-bank swasta meningkat. Akibatnya, bank sentral mungkin akan kesulitan dalam mengelola kebijakan

ekonomi mereka karena transisi kebijakan moneter menjadi kurang efisien (Kahn et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa kehadiran transaksi uang elektronik memberikan efek terhadap efektivitas kebijakan moneter. Disamping memberikan efek positif, transaksi uang elektronik juga memiliki pengaruh terbalik terhadap efektivitas kebijakan moneter. Hal tersebut dibuktikan pada hasil IRF, di mana shock dari nominal transaksi uang elektronik akan direspon negatif oleh inflasi dan suku bunga dalam kurun waktu 36 periode atau setara dengan 36 bulan lamanya. Periode yang dimaksud adalah jangka waktu yang diperlukan oleh suatu variabel dalam menerima shock atau guncangan yang diberikan oleh variabel lainnya dalam permodelan.

Adapun detail hasil yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pertama, dalam jangka panjang volume transaksi uang elektronik memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Dimana kontribusi yang diterima oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 19,81%, sedangkan kontribusi yang diterima oleh suku bunga adalah sebesar 17,13% dalam kurun waktu 36 bulan. Selain memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan suku bunga, kenaikan volume transaksi uang elektronik juga akan memberikan dampak inflasioner. Adapun sifat uang elektronik yang mudah dan cepat dalam melakukan transaksi dapat membut perputaran uang di masyarakat meningkat. Hal tersebut dapat mendorong konsumsi juga ikut meningkat. Yang artinya kemunculan uang elektronik dapat mendorong konsumsi masyarakat, tingkat konsumsi yang tinggi tersebut secara terus-menerus akan menimbulkan kenaikan inflasi (Jati, 2015).

Meningkatnya penggunaan uang elektronik telah memacu perkembangan teknologi finansial yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi tanpa uang tunai (Omodero, 2021). Layanan pembayaran dengan uang elektronik mempermudah individu untuk bertransaksi secara efisien dan cepat, dengan dorongan tambahan berupa potongan harga atau cashback yang ditawarkan oleh banyak pedagang saat pembayaran dengan uang elektronik. Manfaat yang ditawarkan oleh uang elektronik semakin terasa dampaknya selama pandemi COVID-19 di Indonesia, ketika masyarakat terbatas dalam aktivitas di luar rumah. Banyak orang beralih dari pembayaran konvensional ke pembayaran elektronik karena pertimbangan kesehatan dan kenyamanan. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp786,35 triliun pada tahun 2021, meningkat sebesar Rp281,39 triliun (55,73%) dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp504,96 triliun. Di wilayah Sumatera sendiri, terjadi peningkatan drastis sebesar 324% dalam transaksi menggunakan uang elektronik selama pandemi.

Tentunya, temuan ini memiliki implikasi yang cukup penting mengingat pesatnya pertumbuhan adopsi uang elektronik oleh masyarakat Indonesia. Di balik berbagai keuntungan yang disediakan oleh uang elektronik seperti memudahkan transaksi dan menyediakan akses keuangan terhadap kelompok unbanked, uang elektronik juga memiliki implikasi terhadap stabilitas harga. Pada penelitian ini, ditemukan uang elektronik dapat meningkatkan harga dan mempengaruhi stabilitas harga. Diperlukan bauran kebijakan yang tepat untuk tetap memperluas akses uang elektronik dan meredam kemungkinan adanya kenaikan tingkat harga.

Dukungan infrastruktur uang elektronik mengimbangi dampak kecepatan perputaran uang yang rentan terhadap terjadinya inflasi dalam jangka panjang (Wardhono et al., 2019a). Pertambahan kredit memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap

kenaikan transaksi uang elektronik (e-money) yang berarti preferensi masyarakat terhadap transaksi pembayaran digital semakin menguat. Namun pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang masih belum mampu mendorong kenaikan transaksi uang elektronik.

Digitalisasi sistem pembayaran masih belum sepenuhnya diakses dengan baik (well-literate) seluruh segmen masyarakat. Masih terdapat masyarakat terutama di wilayah remote area yang masih memiliki inklusi dan literasi keuangan yang masih rendah (Wardhono et al., 2016,2017,2018). Sementara dalam jangka pendek, penyesuaian terhadap koreksi kesalahan signifikan hanya pada persamaan pertumbuhan ekonomi dan kredit. Sejalan dengan hasil estimasi jangka panjang, peningkatan transaksi uang elektronik tidak mendorong kenaikan inflasi yang berarti bahwa dalam jangka pendek, percepatan uang elektronik dan perputaran uang cukup efektif dalam menjaga stabilitas harga. Dalam jangka pendek, seluruh determinan uang elektronik tidak signifikan secara statistik.

Alat pembayaran yang inovatif dan praktis berupa uang elektronik diharapkan dapat membantu kelancaran alur pembayaran aktivitas ekonomi yang efisien dan cepat sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi ekonomi (Bank Indonesia, 2019). Perkembangan uang elektronik diharapkan pula dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mempunyai akses kepada sistem perbankan. Penyelenggaraan Uang Elektronik telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Terdapat beberapa manfaat dari uang elektronik, tetapi di sisi lain terdapat beberapa risiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari pengguna produk keuangan berbasis digital yakni sebagai berikut (Bank Indonesia, 2019):

1. Risiko uang elektronik bisa hilang dan dapat digunakan oleh pihak lain karena uang elektronik sama seperti uang tunai, jika hilang, maka tidak dapat diklaim kepada penerbit.
2. Risiko karena masih kurang pahami pengguna maupun merchant dalam menggunakan uang elektronik, seperti penggunaan double charge pada mesin electronic data capture (EDC) untuk transaksi yang sama sehingga tercatat dua kali transaksi.

Maka upaya edukasi pada masyarakat secara intensif sangat penting untuk dilakukan sehingga bukan hanya memberikan akses atau inklusi namun juga secara literasi, masyarakat menjadi terliterasi (well literate), baik dalam alokasi penggunaan, teknik penggunaan hingga mitigasi terhadap risiko kegagalan atau penyalahgunaan.

Perilaku manajemen keuangan menjadi salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. (Maharani, 2016) mendefinisikan perilaku manajemen keuangan merupakan kemampuan individu untuk dapat bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan terhadap uang maupun aset dengan cara yang dianggap produktif. Pada dasarnya perilaku manajemen keuangan muncul karena adanya keinginan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Individu yang memiliki perilaku manajemen keuangan cenderung membuat anggaran, mengontrol belanja, hemat, serta bertanggung jawab terhadap uang yang dimilikinya.

Pengetahuan keuangan terdiri dari keterampilan keuangan (financial skill) dan penguasaan alat keuangan (financial tools). (Humaira, 2018) menjelaskan bahwa keterampilan keuangan menjadi sebuah teknik untuk membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan, seperti menyiapkan sebuah anggaran, berinvestasi, memilih asuransi, dan menggunakan kredit. Sementara alat keuangan adalah sarana yang digunakan dalam pembuatan keputusan manajemen keuangan, seperti cek kartu kredit dan kartu debit.

Perkembangan fintech yang memunculkan berbagai inovasi aplikasi dalam layanan keuangan, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat salah satunya membantu

masyarakat dalam bertransaksi. Hal inipun terjadi karena adanya kemajuan teknologi seiring berkembangnya zaman. Beralihnya masyarakat ke fintech didasari oleh kemudahan dan kecepatan dalam mengakses berbagai kepentingan yang menyebabkan banyaknya perusahaan fintech di Indonesia. Perilaku manajemen keuangan masyarakat Indonesia yang awalnya lebih mengutamakan penggunaan transaksi pembayaran secara manual dalam berbagai aktivitasnya. Kini berubah semenjak adanya Pandemi Covid-19. Pada masa pandemi ini mengalami perbedaan dimana masyarakat dituntut untuk menggunakan sistem pembayaran berbasis Cashless.

KESIMPULAN

Uang elektronik (e-money) tidak menimbulkan dampak inflasioner terhadap stabilitas harga baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Instrumen suku bunga cukup efektif dalam mengendalikan kecepatan perputaran uang yang berasal dari uang elektronik. Sehingga transaksi uang elektronik memberikan dampak yang efektif terhadap kebijakan moneter. Kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak memberikan pengaruh terhadap kenaikan transaksi uang elektronik (e-money), begitu pula dalam jangka pendek tidak memberikan dampak yang signifikan. Percepatan pertumbuhan ekonomi terhadap pembayaran digital masih belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat oleh karena tingkat inklusi keuangan yang masih rendah. Uang elektronik tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan kredit dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang potensi kenaikan kredit akan diikuti atau berbanding lurus dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital.

Finansial Technology (Fintech) adalah penggabungan antara sistem keuangan dan teknologi. Perkembangan fintech yang hadir di Indonesia memunculkan berbagai inovasi aplikasi khususnya dalam layanan keuangan seperti sebagai alat transaksi pembayaran, alat penyimpanan uang, dan juga alat peminjaman uang.

Berkembangnya digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, telah membuka pintu bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi dan investasi dengan lebih efisien dan cepat. Pandemi COVID-19 memperkuat tren ini karena memaksa masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan beralih ke pembayaran nontunai. Keunggulan dalam kemudahan dan kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh uang elektronik memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maupun inflasi di wilayah Sumatera. Temuan penelitian ini secara signifikan mengindikasikan bahwa uang elektronik memiliki pengaruh positif di wilayah Sumatera, dengan setiap kenaikan 1% dalam persentase transaksi uang elektronik terhadap PDRB akan meningkatkan inflasi sebesar 0,723%, 0,963%, dan 0,956% untuk model pertama, kedua, dan ketiga secara berurutan, ceteris paribus.

Perilaku manajemen keuangan menjadi salah satu konsep penting pada disiplin ilmu keuangan. Perilaku manajemen keuangan muncul karena adanya keinginan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan yang berdasarkan pada pendapatan yang diperoleh. Saat ini menerapkan perilaku manajemen keuangan dapat menggunakan fintech. Contohnya untuk memperoleh dana untuk mengembangkan usaha dan menambah penghasilan dapat menggunakan fintech jenis Microfinancing.

DAFTAR PUSTAKA

- WARJIYO, Perry, et al. Kebijakan moneter di Indonesia. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Dwihapsari, R., Kurniaputri, M. R., & Huda, N. (2021). Analisis Efektifitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2013-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4.
- Syarifuddin, F., Hidayat, A., & Tarsidin, T. (2009). Dampak peningkatan pembayaran non-tunai terhadap perekonomian dan implikasinya terhadap pengendalian moneter di Indonesia. *Buletin ekonomi moneter dan perbankan*, 11(4), 369-402. <https://doi.org/10.21098/bemp.v11i4.346>
- Kumala, S. L. (2021). Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 109-117. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i2.190>
- Erlangga, M. Y. (2020). Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 5.
- Safitri, T. A. (2021). Kontribusi Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, 140-145.
- Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh transaksi non tunai terhadap jumlah uang beredar di Indonesia tahun 2015-2018 dengan inflasi sebagai variabel moderasi. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi*, 11(2), 269-283. doi: <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>.
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W.F. (2018). Analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47-62. doi: <https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.47-62>.
- Pukuh, N., & Widyasthika, H. F. (2021). Transformasi Ekonomi dan Keuangan Digital: Analisis Persebaran dan Peluang Penggunaan Layanan E-Commerce dan E-Banking di Sumatera. *Prosiding Call for Paper 2nd Sumatra Economic Summit (2nd Sumatranomics) 2021*, 2019, 70-97.
- Seftarita, C., & Azra, U. (2017). Analisis Peluang Penggunaan Layanan Keuangan Digital (Lkd) Pada Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. *Jurnal Ekombis*, III(1), 1-16. <http://180.250.41.45/ekombis/article/view/385>.